



Judul : Kepastian Hak Angket di Rapat Paripurna DPR
Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Kepastian Hak Angket di Rapat Paripurna DPR

Rapat paripurna DPR pada hari ini menjadi momentum penanda keseriusan pengajuan hak angket kecurangan pemilu.

AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com

KOALISI partai politik (parpol) pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diyakini solid untuk menggulirkan hak angket DPR kecurangan pemilu dalam masa sidang yang dimulai pada hari ini.

"Semuanya akan berjalan sesuai. Nanti akan memutuskan bagaimana teknisnya. Hak angket akan diajukan ketika masa sidang DPR, di situlah akan terjadi di masa sidang DPR itu. Detail tentang itu, besok akan kami lihat," kata Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Jakarta, kemarin.

Dalam Undang-Undang No-

mor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, penggunaan hak angket harus diajukan minimal oleh 25 anggota DPR yang lebih dari satu fraksi. Setelah itu, usul tersebut akan dibawakan ke rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 50% anggota dewan untuk mendapat persetujuan.

Jika dua parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa bergabung dengan tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin, akan ada 314 anggota atau 55% dari total 575 kursi DPR periode 2019-2024.

Hidayat meyakini hak angket tidak akan gembos karena lima fraksi telah berkomitmen mendukung. Lima fraksi itu ialah PKS, NasDem, PKB, PDIP, dan PPP. "Belum ada satu pun dari lima fraksi itu yang mengatakan

tidak berkomitmen," kata dia.

Akan tetapi, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani mengaku belum ada pembahasan di internal fraksi soal hak angket. "Belum (ada pembahasan internal fraksi). Kami masih menunggu PDIP karena kan mereka yang menginisiasi," kata Irma.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau ambil pusing dengan persoalan hak angket kecurangan Pemilu 2024. "Itu urusan DPR," ujar Presiden.

Presiden Jokowi tidak menanggapi jauh ihwal hak angket yang dapat terealisasikan sesuai reses DPR. "Silakan tanyakan ke DPR," kata dia kembali.

Waspada pengembosan

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

purna sepi-sepi saja, itu artinya kita di *prank* orang-orang yang selama ini yang bicara ingin membongkar kecurangan pemilu dengan menggunakan hak angket," kata dia.

Lucius mengaku ragu DPR akan menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. Pasalnya, sambung dia, wacana penggunaan hak angket masih berupa narasi. Belum ada, imbuhnya, anggota dewan yang menyebarkan pengumpulan dukungan tanda tangan untuk menggunakan hak tersebut. "Kami juga membaca jang-jangan ini hanya *prank* atau intimidasi ringan untuk penyelenggara. Seolah-olah ini akan sangat seram sampai *impeachment*," ujar Lucius.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Spektrum Oposisi Terpimpin (Spot) mendesak Anies dan Ganjar untuk segera menyatukan parpol.

"Kalau mau ambil sikap politik, tidak boleh beretorika. Pak Ganjar dan Pak Anies segera satukan parpol," ungkap Koordinator Spot Faizal Assegaf.

Faizal menerangkan kedua capres harus segera melakukan langkah terukur agar bisa memastikan hak angket berjalan sesuai dengan pernyataan di ruang publik. (Ykb/Fah/Bob/Fik/X-7)

Jakarta Andi Faisal Bakti berharap wacana hak angket DPR kecurangan pemilu bisa bergulir untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, dibutuhkan komitmen dan mental yang kuat bagi anggota DPR dan parpol bisa mewujudkan hak angket. "Ini memang tugas kepartaian dan tokoh-tokoh partai. Mudah-mudahan mereka bisa konsisten. Tidak masuk angin," kata dia.

Andi menambahkan, soliditas lima fraksi harus tetap dikawal dari upaya pengembosan. "Memang ini harus benar-benar orang-orang yang mental kuat, tidak tergoda rayuan, serta tidak ada koersi dan seduksi. Kalau mereka bisa bertahan, hak angket bisa berjalan," kata Andi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menambahkan, rapat paripurna DPR menjadi penentu nasib hak angket. "Kalau di rapat pari-